

Alasan Indonesia Menyatakan Minat Bergabung ke Trans-Pacific Partnership (TPP) Tahun 2015

Wanda Prescilia Sheny Cralita

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email : wandasheny@gmail.com

Abstract

This study aims at analyzing the reason of Indonesia declaring interest in joining Trans-Pacific Partnership (TPP) in 2015 through the statement of President Joko Widodo delivered at a meeting with President Barack Obama during his visit to the United States in Washington DC on October 26th, 2015. This raises questions from the writer given that Indonesia has previously refused the invitation of the United States in terms of joining the trade block presented at the 19th APEC Summit in Hawaii, USA in 2011. Within this study, the writer uses the concept of dynamic equilibrium and the theory of hedging strategy in order to analyze the reason of Indonesia declaring interest in joining TPP. The data are collected in the form of qualitative using literature study. The result shows that Indonesia's reason in declaring interest to join TPP is a strategy amid the rivalry of the United States and China in Asian region by adopting the option of return maximizing. In implementing the hedging strategy, on the one hand, Indonesia acts as a bandwagoner by being close to the United States through TPP in order to maximize economic benefits, yet on the other hand, such action is Indonesia's soft balancing effort regarding China's emerging economy in Asia.

Kata Kunci: *Trans-Pacific Partnership, hedging strategy, dynamic equilibrium, return-maximizing.*

Indonesia menyatakan minat untuk bergabung ke dalam Trans-Pacific Partnership melalui pernyataan Presiden RI yaitu Joko Widodo, pada pertemuan dengan Presiden Barack Obama dalam kunjungannya ke Amerika Serikat tepatnya di Washington DC pada 26 Oktober 2015. Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa, "Indonesia is an open economy, and with the 250 million population, we are the largest economy in Southeast Asia. Indonesia intends to join the TPP" (Davis t.t). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dari penulis mengingat sebelumnya Indonesia menolak ajakan Amerika Serikat untuk bergabung ke dalam blok

perdagangan tersebut¹. Setelah pernyataan minat bergabung Indonesia ke TPP disampaikan oleh Presiden RI yaitu Joko Widodo, atensi Indonesia terhadap TPP ditunjukan melalui pembentukan *special committee* oleh pemerintah untuk mengkaji *cost* dan *benefit* bagi Indonesia apabila bergabung ke dalam TPP. Tim pengkaji tersebut terbagi menjadi dua *layer* yaitu

¹ Penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan pada KTT-19 APEC di Hawaii Amerika Serikat dalam Anon, Gita Wirjawan Tegaskan RI Tolak Ajakan Obama Masuk 'TPP', Detik Finance [online]. <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1767659/gita-wirjawan-tegaskan-ri-tolak-ajakan-obama-masuk-tpp> [diakses 10 Oktober 2016].

layer pertama yang terdiri dari *government officials* yang merupakan jajaran dari kementerian yang terkait, serta layer kedua yang terdiri dari tokoh masyarakat mulai dari para ahli hingga ketua asosiasi bisnis (Amindoni t.t).

Pada Oktober 2015, ketika Indonesia menyatakan minat gabung ke dalam TPP, pada dasarnya Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Asean Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Selain itu, sebelum Indonesia menyatakan minat bergabungnya ke Trans-Pacific Partnership, Indonesia sudah lebih dulu bergabung ke dalam RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership yang pembentukannya diinisiasi oleh ASEAN yang untuk pertama kalinya dibentuk pada ASEAN Summit ke 19, November 2011 oleh para pemimpin ASEAN (Ministry of Trade and Industry Singapore 2012, 1) dan RCEP tersebut mencakup negara intra kawasan dan negara ekstra kawasan yang sebelumnya sudah memiliki FTA atau *free trade area* dengan ASEAN. Keanggotaan RCEP tersebut telah mencakup ASEAN+6 yang meliputi negara-negara ASEAN, China, Australia, Jepang, Korea Selatan, India, dan New Zealand. Tujuan dibentuknya RCEP adalah sebagai perdagangan bebas yang diharapkan mampu meningkatkan integrasi ekonomi dan kerjasama diantara ASEAN+6 dan mentargetkan untuk mencapai 32% terhadap GDP global pada tahun 2015 (Das t.t, 3).

Apabila dibandingkan dengan TPP, RCEP akan lebih menguntungkan bagi Indonesia mengingat Indonesia telah terlibat aktif sejak awal dalam proses pembentukan dan proses negosiasi RCEP sehingga memahami betul isi dari perjanjian RCEP. Hal ini dikarenakan RCEP itu sendiri pembentukannya dicetuskan oleh ASEAN sehingga

ASEAN *centrality* pun masih tetap ditekankan di dalam RCEP. Selain itu, RCEP juga memungkinkan bagi para anggota untuk fokus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing negara karena RCEP memberikan negara anggota RCEP keleluasaan berupa *special and differential treatment* terhadap negara anggota RCEP sehingga negara-negara tersebut dapat mengimplementasikan reformasi struktural, terutama bagi negara ASEAN (Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional 2013). Oleh karena RCEP tersebut diinisiasi oleh negara-negara ASEAN maka apabila Indonesia mengikatkan diri ke dalam

RCEP tentunya hal itu sesuai dengan komitmen Indonesia yang ingin untuk tetap menekankan sentralitas ASEAN dalam politik luar negeri Indonesia. Sementara itu, apabila Indonesia bergabung ke dalam TPP maka Indonesia sebagai anggota baru tidak dapat berperan secara aktif karena tidak memiliki kewenangan untuk mengubah peraturan yang telah ditetapkan oleh anggota lama maupun melakukan negosiasi ulang. Dalam tulisan ini, penulis menganalisa alasan Indonesia menyatakan minat bergabung ke dalam TPP dengan menggunakan konsep *dynamic equilibrium* dan teori *hedging strategy*. Konsep *dynamic equilibrium* itu sendiri ialah doktrin dalam politik luar negeri Indonesia mengenai perlunya keseimbangan kawasan atau yang menekankan tidak boleh adanya satu kekuatan dominasi dalam suatu kawasan, serta teori *hedging strategy* yaitu *middle position* yang diadopsi oleh suatu negara kecil atau negara lemah ketika tidak dapat menentukan untuk melakukan *balancing* atau *bandwagoning* (Goh dalam Pascall 2013, 16). Teori hedging dalam tulisan ini menjelaskan pilihan *return-maximizing* yaitu pilihan untuk

XXX: XXX.

memaksimalkan keuntungan dari negara berkekuatan agresif ataupun negara yang dianggap mengancam.

Kebangkitan Ekonomi Cina dan Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia

Trans-Pacific Partnership atau TPP merupakan salah satu blok perdagangan bebas yang telah disepakati pada 5 Oktober 2015 (Zeneli t.t). Anggota dari TPP tersebut hingga tahun 2015 telah berjumlah 12 negara yang meliputi Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, Singapura, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Jepang.

Tabel 1. Proses terbentuknya dan negosiasi TPP

Waktu	Keterangan
1 Januari 2002	Negotiation for the TPSEP are the launched alongside the summit of APEC involving New Zealand, Chile, and Singapore.
1 Januari 2004	Brunei Darussalam joins the original Pasific 3 for negotiation, creating the Pasific 4
1 Januari 2005	The TPSEP enters into force
1 Januari 2006	TPESP calls for a reduction by 90% of all tariffs between member countries, and a reduction of all trade tariffs to 0 by the year 2015

1 Maret 2008	United States agrees to enter into talks with the members of the TPSEP regarding trade liberalization in financial services
1 November 2008	Australia, Peru, and Vietnam join negotiations
1 Januari 2010	South Korea is invited to join the grouping, but declines
1 Oktober 2010	Malaysia joins negotiations
1 Januari 2011	A formal announcement of the TPP is made by parties at the APEC leader's meeting in Honolulu
1 Oktober 2012	Canada and Mexico enter into negotiations for the TPP
23 Juli 2013	Japan formally joins negotiations to establish the Trans-Pacific Partnership
5 Oktober 2015	The Trans-Pacific Partnership agreement is officially confirmed

Diolah dari: Global Edge, tersedia dalam <https://globaledge.msu.edu/trade-blocs/tpp/history>

Amerika Serikat baru bergabung ke dalam TPP pada tahun 2008. Namun sebelum Amerika Serikat bergabung ke

TPP, ekonomi Amerika Serikat mengalami krisis. Krisis tersebut diakibatkan oleh *subprime mortgage* yang menyebabkan kerugian bagi bank-bank investasi dunia yang diperkirakan mencapai jumlah 160 miliar dolar AS (Sihono 2008, 175). Kerugian yang dicapai oleh Amerika Serikat akibat krisis *subprime mortgage* tersebut mencapai 1 triliun dolar AS seperti yang disampaikan dalam laporan sidang International Monetary Fund atau IMF dan IBRD yang dihadiri oleh menteri keuangan serta Gubernur Bank Sentral 185 negara pada 12 dan 13 April 2008 (Sihono 2008, 175). Bahkan krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2007 tersebut juga semakin meluas hingga ke negara-negara Eropa. Akibatnya, harga saham global jatuh dan dollar Amerika Serikat semakin melemah hingga ke angka 1,4967 dollar Amerika terhadap Euro (Sihono 2008, 176).

Terlibatnya Amerika Serikat di dalam TPP pada dasarnya juga tidak terlepas dari adanya pergeseran fokus politik luar negeri Amerika Serikat ke Asia Pasifik atau yang disebut dengan *US Pivot* atau disebut juga sebagai *rebalancing US to Asia*. *US pivot* tersebut menjadi strategi politik luar negeri Amerika Serikat di era kepemimpinan Presiden Obama. Dalam bidang ekonomi, TPP menjadi penerapan dari *rebalancing strategy* Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik terutama dalam membentuk arsitektur dari kerjasama ekonomi di kawasan tersebut (*Asia-Pacific Trade And Investment Report 2009*). TPP pada dasarnya tidak hanya menjadi jalan bagi Amerika Serikat untuk memperoleh akses pasar yang semakin luas, namun Amerika Serikat juga ingin membentuk suatu kerjasama dengan perjanjian modern di kawasan Asia Pasifik (Petri et al. 2011, 170). Seperti yang disampaikan oleh Presiden Obama dalam pidatonya,

“TPP akan meningkatkan perekonomian kita, mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan investasi, meningkatkan ekspor dan juga

membuka lebih banyak lapangan kerja bagi rakyat kita.... TPP berpotensi untuk menjadi contoh yang tidak saja untuk kawasan Asia Pasifik tetapi juga untuk perjanjian-perjanjian perdagangan di masa depan” (Manyin 2012).

Amerika Serikat memandang bahwa Asia memiliki posisi yang semakin vital bagi keamanan maupun ekonomi Amerika Serikat (Fergusson dan Vaughn 2010). Yang menjadi tujuan dari kebijakan *Pivot to the Asia* adalah untuk meningkatkan peran Amerika Serikat di dalam kepemimpinan Asia dalam beberapa dekade ke depan (Lieberthal 2012). Selain itu, kebijakan *US Pivot* tersebut juga menandakan perubahan kebijakan luar negeri dari Timur Tengah yang kemudian mulai untuk memprioritaskan ke Asia Pasifik (Quinn 2013, 1). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat,

“Here, we see the future. As the world’s fastest-growing region-and home to more than half the global economy—the Asia Pacific is critical to achieving my highest priority: creating jobs and opportunity for the American people. With the most of the world’s nuclear powers and some half of humanity, Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering or human progress”².

Membicarakan mengenai TPP maka tidak dapat dilepaskan dari peran Amerika Serikat dengan ekonominya yang merupakan terbesar di dunia

² Presiden Obama menyampaikan adanya pergeseran fokus politik luar negeri Amerika Serikat saat itu melalui pidatonya di depan parlemen Australia pada 17 November 2011 dalam

Remarks By President Obama to the Australian Parliament, The White House – Office of the Press Secretary. [online]

<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament> [diakses pada 24 Maret 2017].

sehingga memiliki kemampuan untuk mengajak negara-negara lain untuk turut bergabung ke dalam TPP (Lembaga Pertahanan Nasional 2013, 64). TPP di tahun 2008 belum dapat menarik perhatian dunia internasional karena negara-negara anggota TPP yang telah bergabung hingga tahun 2008 adalah negara dengan PDB kecil, dan dengan bergabungnya Amerika Serikat serta kemudian menjadi leader mampu memberikan perubahan yang baik bagi TPP. Amerika Serikat aktif dalam mengembangkan TPP yang salah satunya dilakukan melalui keaktifan AS menawarkan perjanjian TPP ke berbagai negara terutama negara anggota APEC termasuk Indonesia sebagai negara yang memiliki perekonomian terbesar di Asia Tenggara dengan produk domestik bruto senilai lebih US\$1 triliun (Wangke 2015, 5). TPP berdasarkan pada prospek dan partisipasi negara anggotanya serta ruang lingkup politik dalam regional perdagangan bebas yang hal-hal tersebut kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi global dengan menyumbang PDB dunia sebesar 40% dengan mencakup jumlah populasi sebesar 783 juta jiwa atau 11,35% dari penduduk dunia (Fergusson 2014).

Sementara itu, Cina di kawasan Asia telah menjadi salah satu negara *emerging economies*. *Emerging economies* oleh seorang ahli ekonomi di World Bank didefinisikan sebagai suatu karakter perekonomian dalam rentan *middle status* di antara negara berkembang dengan negara maju (Daniella dan Roxana t.t, 311). Cina disebut sebagai *emerging economies* karena menjadi salah satu negara yang mengalami perubahan posisi dan mengalami kebangkitan dalam aspek ekonomi. Pada dasarnya kebangkitan ekonomi Cina tidak dapat dilepaskan dari adanya reformasi ekonomi yang menggeser perekonomian Cina dari sistem *centrally-planned* ke *market-based economy* yang dilakukan pada kepemimpinan Deng Xiaoping pada tahun 1978. Dari situlah Cina mampu meningkatkan perekonomiannya secara cepat hingga mampu memposisikan

Cina sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan tentunya dengan posisi tersebut maka Cina semakin memiliki peranan penting dan juga berpengaruh dalam perekonomian global (The World Bank 2016). Reformasi yang terjadi di Cina, tepatnya reformasi ekonomi, tidak berlangsung secara singkat namun terjadi secara bertahap melalui tiga tahapan. Pertama, pada tahun 1978 hingga 1984 yang berkonsentrasi pada area rural (Ding dan Knight t.t, 4). Tahap ini berfokus pada pemberian hak dalam kepemilikan lahan dalam jangka waktu yang panjang dan juga hak untuk menjual hasil produksi langsung pada pasar terbuka. Bahkan pemerintah juga telah memberikan izin bagi perusahaan non-pertanian untuk beroperasi di wilayah pedesaan hingga kemudian mampu memproduksi *light manufactures*. Pada tahapan ini, *foreign direct investment* atau FDI juga memperoleh perhatian besar dari Deng Xiaoping dan bahkan dijadikan sebagai bagian utama dari adanya reformasi dan keterbukaan (Gallagher 2002, 340).

Kedua adalah tahapan yang terjadi pada tahun 1985 hingga 1992 yang mulai fokus reformasi terhadap BUMN yang diberikan otonomi manajerial yang luas secara bertahap yang ditujukan agar mampu mendorong efisiensi kinerja perusahaan dan khususnya untuk meningkatkan daya saing (Ding dan Knight t.t, 4). Selain itu, pada tahapan kedua ini perhatian utama tetap berfokus terhadap FDI dan dinilai berhasil yang ditunjukkan dengan adanya FDI yang berhasil ditarik masuk ke Cina yang berjumlah lebih besar jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya sejak awal tahun 1990an (Gallagher 2002, 340). Selanjutnya pada tahap ketiga reformasi, mulai adanya penerimaan terhadap sektor-sektor privat serta adanya komitmen untuk semakin memperkuat sektor privat yang dimulai pada tahun 1993. Pertumbuhan ekonomi Cina semakin didukung dari sektor FDI yang masuk ke Cina dengan jumlah yang melebihi di negara-negara

lain di dunia dari tahun 1993 kecuali Amerika Serikat (Gallagher 2002, 340).

Dampak dari adanya kebangkitan ekonomi Cina tersebut tidak hanya berdampak terhadap hubungan politik maupun ekonomi Cina dengan negara-negara di dunia, akan tetapi kemudian juga mampu mengubah kontur ekonomi dan politik regional maupun global (Golley dan Song 2011, 1). Pertumbuhan ekonomi Cina yang begitu cepat membuat pertumbuhan ekonomi global kini semakin terkonsentrasi di kawasan Asia dibandingkan dengan sebelumnya yang konsentrasi utama ekonomi global berada di wilayah Eropa dan Amerika. Bangkitnya ekonomi Cina ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rata-rata pertumbuhan PDB yang mencapai hampir 10% dalam satu tahun, hingga mampu untuk mengangkat sekitar 800 juta orang keluar dari garis kemiskinan (The World Bank t.t). Dari indikator keterbukaan ekonomi, keterbukaan ekonomi Cina itu sendiri dapat dilihat dari adanya kebijakan terbuka atau yang disebut dengan *kaifang* yang mampu mendorong meningkatkan perdagangan luar negeri dan membuka pintu bagi perusahaan asing yang akan berinvestasi di Cina. Keuntungan besar bagi perekonomian Cina tidak lain juga dikarenakan adanya *foreign direct investment* tersebut (Stiglitz 2003, 508). FDI yang mengalir ke Cina beberapa dekade terakhir hampir mencapai 1 triliun dollar AS (Golley dan Song 2011, 4). Hal ini telah membuat Cina menjadi salah satu negara penerima FDI terbesar di dunia. Sementara itu dari sisi indikator keterwakilan dan peranan Cina di tingkat internasional, dapat dikatakan bahwasanya peran Tiongkok dalam dunia internasional cukup besar. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari keanggotaan Cina dalam NGO seperti WTO, hingga hubungan kerjasama dengan negara-negara lain, baik di wilayah Asia, Amerika Latin, hingga kawasan Afrika. Cina juga aktif dalam menjalin hubungan bilateral seperti misalnya dalam berbagai bentuk *free trade area* atau FTA yang dalam hal ini,

Cina setidaknya tergabung ke dalam 11 FTA dan melibatkan hingga 20 negara (China FTA Network t.t).

Di samping itu, untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya, Cina juga melakukan kerjasama perdagangan dengan negara-negara Asia seperti pada kerjasama regional Asia yaitu Northeast Asia Free Trade Area yang melibatkan Cina, Korea Selatan, dan Jepang, ASEAN+3, dan juga ASEAN+6 yang beranggotakan ASEAN+3 beserta negara India, Australia, dan Selandia Baru. Semakin terhubungnya Cina dengan beberapa perdagangan regional di Asia telah membuat Cina memiliki peranan yang semakin penting di kawasan Asia.

Table 2. Top 10 countries by GDP

Rank	Country	GDP (billions of \$)		% Share	Continent
		2013	2014		
1	United States	16,768.050	17,418.925	22.53%	North America
2	China	9,469.125	10,380.380	13.43%	Asia
3	Japan	4,919.564	4,616.335	5.97%	Asia
4	Germany	3,731.427	3,859.547	4.99%	Europe
5	United Kingdom	2,680.123	2,945.146	3.81%	Europe
6	France	2,807.306	2,846.889	3.68%	Europe
7	Brazil	2,391.029	2,353.025	3.04%	South America
8	Italy	2,137.615	2,147.952	2.78%	Europe
9	India	1,875.157	2,049.501	2.65%	Asia
10	Russia	2,079.134	1,857.461	2.40%	Europe

Sumber: Statistic Time dalam <http://statisticstimes.com/economy/world-gdp-ranking.php>

Berdasarkan pada table 2 di atas menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Cina, dan Jepang merupakan tiga negara dengan GDP terbesar di dunia dengan nilai GDP AS yang mencapai angka 17.419 miliar dollar AS, diikuti Cina pada urutan kedua dengan nilai GDP sebesar 10.380 miliar dollar AS serta Jepang diposisi ketiga dengan nilai GDP yang mencapai 4.616 miliar dollar AS. Apabila GDP dari ketiga negara tersebut digabung maka mampu menyumbang 35,96% GDP global.

Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat

Bagi Indonesia, Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utamanya. Setidaknya terdapat tiga hal yang menyebabkan mengapa negara

mitra strategis memiliki nilai yang penting bagi Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI t.t, 41). Pertama, sebagai mitra dagang dan ekonomi utama Indonesia, serta sebagai sumber modal asing. Kedua, sebagai sumber dalam meningkatkan kapasitas Indonesia di berbagai bidang baik dalam bidang keamanan, pertahanan, ekonomi, pendidikan, *good governance*, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang-bidang yang lainnya. Ketiga, sebagai mitra kerjasama bagi Indonesia dalam penanganan isu-isu global. Berikut penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai mitra strategis bagi Indonesia khususnya hubungan kerjasama ekonomi dan diplomatik diantara keduanya. Membicarakan mengenai kerjasama ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat, berikut penulis menunjukan negara-negara yang merupakan mitra dagang utama Indonesia pada tahun 2013 dilihat dari negara tujuan ekspor Indonesia dan juga negara asal impor ke Indonesia.

Diagram 1. Indonesian Export Destination of 2013



Sumber: www.trademap.org

Diagram 2. Origin of Imports to Indonesia of 2013



Sumber: www.trademap.org

Dari diagram 1 di atas dapat dilihat bahwasanya Amerika Serikat merupakan salah satu mitra ekspor utama bagi Indonesia dengan persentase ekspor sebesar 8,6% dari keseluruhan total ekspor di Indonesia pada tahun 2013. Di samping itu, terdapat pula negara Jepang, China, EU, dan juga Singapura dengan masing-masing persentase eksportnya sebesar 14,8%, 12,4%, 9,2% dan 9,1%. Meskipun Amerika Serikat tidak berada pada urutan teratas sebagai partner ekspor Indonesia, namun Amerika Serikat masih termasuk ke dalam Indonesia's top ten trading partner of export. Begitu pula dengan yang ditunjukan pada diagram 2 bahwa Amerika Serikat sebagai salah satu negara dari sepuluh mitra impor utama Indonesia di tahun 2013 dengan besar impor 4,9% dari total impor keseluruhan yang masuk ke Indonesia.

Tabel 3. Indonesia's Top 10 Export Partners 2015

Top 10 Export Partners	Export Volume (\$)
Japan	\$23,127,088,759
China	\$17,605,944,452
Singapore	\$16,752,339,986
United States	\$16,560,075,701
India	\$12,248,959,579
Korea, South	\$10,606,478,322
Malaysia	\$9,731,540,673
Thailand	\$5,784,719,711
Australia	\$4,962,452,276
Netherlands	\$3,984,581,541

Sumber:

<https://globaledge.msu.edu/countries/indonesia/tradestats>

Sementara di tahun 2015, berdasarkan pada table 3 di atas menunjukkan bahwa Amerika Serikat sebagai salah satu mitra dagang strategis Indonesia masih masuk ke dalam 10 mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai ekspor sejumlah 16.560.075.701 dollar AS. Sementara itu pada sektor impor, China menduduki posisi teratas sebagai mitra impor Indonesia dengan nilai impor sebesar 30.624.380.094 dollar AS. Meskipun Amerika Serikat tidak berada pada posisi teratas sebagai mitra impor Indonesia, namun Amerika Serikat masih memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia dengan masuknya Amerika Serikat ke dalam 10 mitra impor Indonesia pada tahun 2015 dengan nilai impor sebesar 8.188.541.791 dollar AS seperti yang ditunjukkan pada table 4 berikut ini.

Tabel 4. Indonesia's Top 10 Import Partners 2015

Top 10 Import Partners	Import Volume (\$)
China	\$30,624,380,094
Singapore	\$25,186,115,317
Japan	\$17,007,578,713
Korea, South	\$11,847,411,142
Malaysia	\$10,855,394,373
Thailand	\$9,781,053,021
United States	\$8,188,541,791
Saudi Arabia	\$6,516,224,008
Australia	\$5,647,502,357
Germany	\$4,091,178,958

Sumber:

<https://globaledge.msu.edu/countries/indonesia/tradestats>

Tabel 5. Neraca Perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat tahun 2012-2016

(Nilai: Ribu US\$)

Uraian	2012	2013	2014	2015
TOTAL PERDAGANGAN	26.476.998,5	24.757.366,4	24.700.210,7	23.833.999,3
MIGAS	417.198,9	801.510,3	740.834,7	975.050,6
NON MIGAS	26.059.799,6	23.955.856,1	23.959.376,0	22.858.948,7
EKSPOR	14.874.386,4	15.691.706,4	16.530.103,0	16.240.798,2
MIGAS	283.445,4	609.789,2	673.123,4	932.623,8
NON MIGAS	14.590.941,0	15.081.917,2	15.856.979,6	15.308.174,4
IMPOR	11.602.612,1	9.065.660,0	8.170.107,7	7.593.201,2
MIGAS	133.753,5	191.721,1	67.711,4	42.426,8
NON MIGAS	11.468.858,6	8.873.938,8	8.102.396,3	7.550.774,3
NERACA PERDAGANGAN	3.271.774,4	6.626.046,5	8.359.995,3	8.647.597,0
MIGAS	149.692,0	418.068,1	605.412,0	890.196,9
NON MIGAS	3.122.082,4	6.207.978,4	7.754.583,3	7.757.400,1

Sumber: BPS, *Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade* dalam <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=411>

Berdasarkan data pada table 5 di atas, neraca perdagangan Indonesia dengan negara Amerika Serikat terus mengalami surplus dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Pada tahun 2015, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami surplus sekitar 8,6 miliar dollar AS akibat dari nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang mencapai angka 16,2 dollar AS sementara pada sektor impor Indonesia dari Amerika tercatat sebesar 7,59 miliar dollar AS. Selain itu, ekspor non migas masih menjadi tumpuan utama bagi sektor ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hingga tahun 2015 yang mencapai angka 15,3 miliar dollar AS.

Tabel 6. Perkembangan Ekspor Non Migas Indonesia ke Negara Tujuan Utama 2012-2016

(nilai: juta US\$)

N O	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Tren d(%) 2012 - 2016	Peru b.(%) 2016 /201 5
1	REP. RAKYAT TIONGKOK	20.864,0	21.281,0	16.459,0	13.260,0	15.112,0	-	13,00
2	AMERIKA SERIKAT	14.590,0	15.081,0	15.856,0	15.308,0	15.684,0	1,00	2,00
3	JEPANG	17.231,0	16.084,0	14.565,0	13.096,0	13.212,0	-7,00	0,00
4	INDIA	12.446,0	13.009,0	12.223,0	11.601,0	9.924,0	-5,00	-14,00
5	SINGAPURA	10.550,0	10.385,0	10.065,0	8.661,0	8.725,0	-5,00	0,00
6	MALAYSIA	8.469,0	7.268,0	6.397,0	6.227,0	6.013,0	-8,00	-3,00
7	KOREA SELATAN	6.684,0	6.052,0	5.716,0	5.439,0	5.263,0	-5,00	-3,00
8	THAILAND	5.490,0	5.214,0	5.002,0	4.600,0	4.608,0	-4,00	0,00
9	BELANDA	4.586,0	4.014,0	3.906,0	3.409,0	3.219,0	-8,00	-5,00
10	PILIPINA	3.688,0	3.798,0	3.886,0	3.917,0	5.256,0	7,00	34,00
11	TAIWAN	4.094,0	3.731,0	3.883,0	3.651,0	2.563,0	-9,00	29,00
12	AUSTRALIA	3.358,0	2.973,0	3.696,0	2.994,0	2.660,0	-4,00	-11,00
13	JERMAN	3.074,0	2.881,0	2.820,0	2.661,0	2.635,0	-3,00	-1,00
14	HONGKONG	2.631,0	2.693,0	2.777,0	2.067,0	2.143,0	-6,00	3,00
15	UNI EMIRAT ARAB	1.614,0	1.583,0	2.501,0	1.899,0	1.587,0	1,00	-16,00

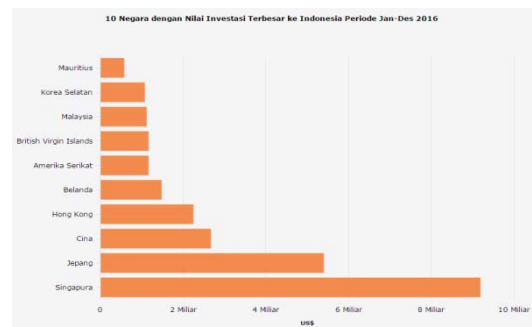
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan dalam <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-export-destination-country>

Tabel di atas menunjukkan bahwasanya Negara Cina, Amerika Serikat dan juga Jepang merupakan tiga negara utama tujuan ekspor non migas Indonesia. Ditahun 2015 tercatat bahwa Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor non migas terbesar dengan nilai ekspor mencapai 15.308,0 juta dollar AS. Yang menjadi komoditas utama sektor non migas Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat ialah karet, tekstil, dan juga Timah (Katadata 2015). Amerika Serikat merupakan salah satu mitra tujuan utama 10 komoditas ekspor Indonesia dan menjadi negara tujuan terbesar pada tahun 2015 khususnya pada komoditas TPT, karet dan produk karet, alas kaki, udang, kakao dan juga kopi (kementerian Perdagangan RI t.t).

Sementara dalam bidang investasi pada periode Januari hingga Juni 2011, Investasi AS di Indonesia mencapai angka 577 juta dollar AS dan menjadi investor terbesar ketiga setelah negara Singapura dan Belanda (Kementerian Luar Negeri RI t.t, 61). Memasuki kuartal pertama pada tahun 2013, posisi Singapura sebagai negara pertama investor terbesar di Indonesia digeser

oleh Jepang dengan total investasi sebesar Rp 1,2 miliar atau mencakup 16,3% dari total penanaman modal asing sebesar Rp 65,5 triliun yang kemudian diikuti oleh AS pada posisi kedua dengan jumlah investasi 900 juta dollar AS atau mencakup 12,6% dari total investasi asing di Indonesia dan posisi ketiga ditempati oleh Korea Selatan yang mampu mngcover 11% investasi asing di Indonesia atau sebesar 800 juta dollar AS (Kementerian Perindustrian RI 2016). Nilai investasi AS tersebut mampu mengcover 12,1% dari total keseluruhan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Menurut data BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, investasi Amerika Serikat di tahun 2014 direalisasikan dalam 179 proyek dengan nilai investasi sebesar 1.299,5 juta dollar AS (Badan Koordinasi Penanaman Modal 2015). Hingga memasuki tahun 2016, Amerika Serikat masih menjadi salah satu investor terbesar bagi Indonesia dengan jumlah investasi sebesar 1,2 miliar dollar AS seperti yang ditunjukan pada diagram berikut.

Diagram 3. Negara dengan Nilai Investasi Terbesar ke Indonesia, 2016



Sumber: Databoks Katadata Indonesia, 2016 dalam <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/26/10-negara-terbesar-investasi-ke-indonesia-2016>

Sedangkan dalam kerjasama diplomatik, ketika Amerika Serikat berada di bawah kepemimpinan Barack Obama sejak tahun 2009, hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami peningkatan pengembangan hubungan kearah yang

positif. Salah satu capaian dari kerjasama antara dua negara tersebut adalah ditandatanganinya suatu kesepatan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, perdagangan dan investasi, sosial budaya, iptek, maupun pendidikan dalam skema Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika atau yang disebut dengan US-Indonesia Comprehensive Partnership yang ditandatangani tahun 2010 (Muhamad 2016, 6). Amerika Serikat dan Indonesia kemudian membentuk JCM atau Joint Commission Meeting RI-AS pada tingkat menteri luar negeri sesuai dengan kerangka dalam Comprehensive Partnership tersebut untuk memantau berbagai kegiatan kerjasama yang telah dijalankan, serta membahas mengenai usaha-usaha untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara tersebut dalam berbagai bidang (Kementerian Luar Negeri t.t, 61).

Dalam bidang investasi, Indonesia dan Amerika Serikat membentuk perjanjian Investment Support Agreement-Overseas Private Investment Cooperation atau ISAOPIC dengan tujuan untuk mengatur penjaminan investasi apabila terjadi kerugian terhadap investor AS di Indonesia dan melalui perjanjian tersebut diharapkan dapat menarik investasi lebih besar dari AS ke Indonesia (Kementerian Luar Negeri t.t, 61). Perjanjian tersebut ditandatangani di Washington, D.C. pada tanggal 13 April 2010. Kemudian diadakannya pertemuan Trade Investment Council atau TIC XI di Washington, D.C. pada 19 September 2011 yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI dan US Trade Representative untuk membahas hambatan dalam beberapa perdagangan. Indonesia pun juga memperoleh keuntungan dalam fasilitas GSP AS yang meliputi 2.144 jenis komoditi nasional RI setelah Pemerintah AS memperpanjang fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) untuk Indonesia pada 21 Oktober 2011 (Kementerian Luar Negeri t.t, 62).

Memasuki tahun 2014, penguatan kerja sama RI-AS dilakukan melalui penyelenggaraan The 4th Joint Commission Meeting tingkat Menlu di Jakarta, 17 Februari 2014, kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Washington, DC, 25- 27 September 2014 dan pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Presiden Barack Obama di sela-sela pertemuan APEC di Beijing, 10 November 2014 (Kementerian Luar Negeri 2014, 33). AS merupakan investor asing terbesar ketiga tahun 2013 dan investasi AS di Indonesia tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan 2014 (Kementerian Luar Negeri 2014, 34). Hal tersebut salah satunya ditandai oleh adanya pembentukan Indonesia-US Investment Alliance antara US Chamber of Commerce dengan KADIN dan APINDO pada Mei 2014 (Kementerian Luar Negeri 2014, 33). Dalam hal ini, terdapat 156 proyek yang direalisasikan dari investasi AS tersebut yang meliputi dalam hal industri kimia dan konstruksi, makanan, pertambangan, serta industri alat angkut dan transportasi. Sementara dalam upaya untuk menangani isu-isu perdagangan, Indonesia memilih dengan melakukan penyelesaian win-win solutions seperti misalnya ialah melalui penandatanganan MoU untuk mengakhiri sengketa Cigarettes (DS-406) oleh Pemerintah Indonesia dan AS di WTO, Jenewa serta tuduhan penyelidikan Countervailing Duty atau CVD atas impor Monosodium Glutamate atau MSG yang dibebaskan dari Indonesia 2014 (Kementerian Luar Negeri 2014, 34).

Tidak hanya sampai disitu, kerjasama bilateral tersebut semakin diperdalam yang ditandai dengan adanya kunjungan Presiden Jokowi ke Washington DC pada Oktober 2015 yang membahas penambahan pada aspek kerjasama di antara kedua negara selain pada hubungan dagang yang perlu untuk terus diperkuat seperti kerjasama maritim, pertahanan, dan juga lingkungan hidup (Muhamad 2016, 6). Dalam hubungan bilateral, Indonesia

merupakan mitra dagang terbesar Amerika Serikat pada urutan ke 28 di samping lima mitra utama dagang Amerika Serikat yaitu Kanada, China, Meksiko, Jepang dan juga Jerman (Muhamad 2016, 6). Sementara itu, Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu key trading partner Indonesia yang menempati posisi keempat sebagai mitra dagang terbesar Indonesia setelah negara China, Jepang, dan Singapura.

Pada November 2011, Presiden Indonesia dan Amerika Serikat juga melakukan pertemuan bilateral di sela-sela rangkaian EAS atau East Asia Summit di Honolulu serta pertemuan pemimpin ASEAN- AS ke 3 yang diadakan di Bali yang dalam pertemuan tersebut Amerika Serikat kembali menegaskan dukungannya terhadap keamanan dan integritas wilayah NKRI serta juga disepakatinya penyelenggaraan JCM III di tahun 2012 melihat kemajuan hubungan bilateral AS-RI yang dinilai semakin pesat selama setahun setelah ditandatanganinya Comprehensive Partnership (Kementerian Luar Negeri t.t, 6). Tidak hanya pada level bilateral, hubungan kerjasama diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat juga dibangun dalam ranah multilateral seperti pelaksanaan KTT ASEAN-AS yang di dalamnya melibatkan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia yang bersama dengan Amerika Serikat seringkali membicarakan isu kawasan maupun global hingga upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara tersebut (Muhamad 2016, 6). Selain itu, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam level multilateral juga dijalin melalui ARF atau ASEAN Regional Forum yang umumnya digunakan oleh Amerika Serikat dan negara anggota ASEAN untuk mendiskusikan isu keamanan kawasan seperti diantaranya isu Laut Cina Selatan maupun isu maritim di kawasan Asia Timur (Muhamad 2016, 6).

Terkait dengan isu kedaulatan territorial yang salah satunya adalah konflik Laut

Cina Selatan, yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang terlibat termasuk negara-negara besar dengan membawa kepentingannya masing-masing. Amerika Serikat yang memilih untuk turut membantu penyelesaian konflik Laut Cina Selatan tersebut melihat adanya ancaman yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas dari keamanan kawasan Asia Pasifik itu sendiri. Dalam upaya tersebut, Amerika Serikat mencegah adanya perluasan perang atau terjadinya perang terbuka sehingga berusaha menghindari penyelesaian konflik menggunakan kekuatan militer namun lebih mengedepankan cara-cara yang diplomatis dan damai. Selain itu Amerika Serikat juga tidak mengambil posisi diantara negara-negara pengklaim³ dan menekankan tiap pihak yang bersengketa haruslah menyesuaikan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) dalam mengejar klaim teritorial mereka.

Bentuk penekanan terhadap penyelesaian konflik secara diplomatis dan damai juga ditunjukkan oleh Amerika Serikat melalui dukungan Amerika Serikat terhadap penegasan akan standar perilaku yang telah disepakati antara ASEAN dan China pada tahun 2002 dalam *ASEAN-China Declaration on the Conduct (DOC) of the Parties in the South China Sea* dan kemudian juga untuk merumuskan kode etik yang sifatnya dapat mengikat secara hukum (Zao 2010:12). Lebih lanjut, pemerintah Amerika Serikat menunjukkan perhatian yang besar terhadap wilayah ASEAN untuk menjadi fokus kerangka multinasional sehingga nantinya keputusan yang diperoleh tidak hanya

³ Disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Hillary Clinton dalam Indonesia-AS Berkomitmen Ikut Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan, 4 September 2012. [online] <http://indonesia.ucanews.com/2012/09/04/indonesia-as-berkomitmen-ikut-menyelesaikan-konflik-laut-china-selatan/> [diakses pada 23 April 2017].

memihak kepada salah satu negara yang terlibat konflik, namun lebih cenderung akan bersifat regional. Penekanan yang dilakukan AS terhadap pentingnya kerangka multinasional di wilayah ASEAN tersebut nantinya diharapkan juga mampu untuk memberikan keputusan yang bersifat *forum international rule-making* sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap seluruh wilayah dan juga bersifat mengikat secara hukum. Dari sini maka kemudian dapat dilihat bahwasanya dengan adanya penekanan Amerika Serikat terhadap pentingnya berbagai perundingan multinasional di wilayah ASEAN seperti diantaranya adalah EAS atau East Asia Summit serta ARF atau ASEAN Regional Forum dalam upaya untuk mengatasi konflik kedaulatan teritorial yang didalamnya juga melibatkan peran penting Indonesia maka hal ini tentunya akan mendorong adanya hubungan yang semakin intens antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk membahas mengenai penyelesaian konflik Laut Cina Selatan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan pada penjabaran di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa alasan Indonesia menyatakan minat bergabung ke dalam TPP pada tahun 2015 dan juga menunjukkan atensi di dalamnya setelah sebelumnya tidak menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dikarenakan sebagai bentuk respon Indonesia di tengah rivalitas antara Amerika Serikat melalui kebijakan *Rebalancing US to Asia* dan Cina dengan *emerging economy*nya di kawasan Asia. Semakin intensnya keberadaan Cina dan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik tidak lain karena kawasan tersebut di abad 21 merupakan kawasan yang dinamis serta memiliki banyak kerjasama bilateral maupun multilateral. Kebangkitan Cina tidak dapat dilepaskan dari adanya kebijakan *open door policy* nya yang mampu meningkatkan ekonomi Cina yang semakin pesat bahkan mampu mendorong perekonomian global.

Kebangkitan ekonomi Cina tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rata-rata pertumbuhan PDB yang mencapai hampir 10% dalam satu tahun, peranan Cina yang semakin aktif di tingkat internasional seperti keanggotaan Cina dalam NGO seperti WTO, hingga jalinan kerjasama dengan negara-negara lain hingga kemudian Cina bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 2014 menjadi tiga negara dengan GDP terbesar di dunia.

Sementara itu, Amerika Serikat menggeser fokus politik luar negeri Amerika Serikat dari Timur Tengah ke kawasan Asia Pasifik atau yang disebut dengan *US Pivot* atau *rebalancing US to Asia* untuk meningkatkan peran Amerika Serikat di dalam kepemimpinan Asia dalam beberapa dekade ke depan. TPP itu sendiri menjadi penerapan dari *rebalancing strategy* Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dalam bidang ekonomi terutama dalam membentuk arsitektur dari kerjasama ekonomi di kawasan tersebut. Amerika Serikat juga menunjukkan keaktifannya dalam mengembangkan TPP dengan peran aktifnya untuk menawarkan perjanjian TPP ke negara-negara lain terutama negara-negara dengan ekonominya yang besar seperti diantaranya Indonesia dan Jepang, namun dalam hal ini Amerika Serikat tidak turut melibatkan Cina. Peran Amerika Serikat yang semakin besar di kawasan tersebut juga tidak lepas dari adanya kebangkitan ekonomi Cina yang dikawatirkan akan semakin mendominasi kawasan tersebut.

Dalam merespon rivalitas Amerika Serikat dan Cina di kawasan Asia khususnya dalam persaingan ekonomi keduanya, Indonesia menggunakan strategi *hedging*. Dalam hal ini, Indonesia melakukan *soft bandwagoning* dengan mengadopsi pilihan *return-maximizing* yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan ekonominya dengan mendekatkan diri kepada Amerika Serikat melalui TPP karena Amerika

Serikat merupakan *key trading partner* Indonesia dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Upaya Indonesia dalam menguatkan ekonominya terhadap AS melalui TPP

tersebut sekaligus sebagai upaya *soft balancing* Indonesia terhadap *emerging economy* Cina di kawasan Asia guna mencegah munculnya satu dominasi kekuatan di kawasan Asia.

Daftar Pustaka

- [1] Baldwin, Richard E. 2008. "The East Asian Noodle Bowl Syndrome.", dalam Hiratsuka,
- [2] Daisuke and Fukunari Kimura *East Asia's Economic Integration: Progress and Benefit*. New York, Palgrave Macmillan.
- [3] Golley, Jane dan Ligang Song, 2011. "China's Rise in a Changing World", dalam Ligang Song & Jane Gooley (eds), *Rising China: Global Challenges and Opportunities*. Canberra, ANU E Press.
- [4] Pascall, Laura, 2013. Are US Alliances Japan and South Korea Hedging China. Manawatu, Messay University.
- [5] Zao, Shuisheng, 2010. Shoring up US Leadership in the Asia Pacific: The Obama Administration's Hedge Strategy against China. Melbourne, Burwood Campus.
- [7] Daniella-Neonila, Mardiros dan Roxana-Manuela, Dicu, t.t. The Emerging Economies Classification in Terms of Their Defining, Grouping Criteria and Acronyms Used for This Purpose.
- [8] Ding, Sai dan John Knight, t.t. *Why has China Grown so Fast? The Role of Structural Change*. Department of Economics, University of Oxford.
- [9] Fergusson, Ian F dan Bruce Vaugh, 2010. *The Trans-Pacific Partnership Agreement*, Congressional Research Service.
- [10] Fergusson, Ian F dkk., 2014. The Trans-Pacific Partnership (TPP) Negotiations and Issues for Congress Congressional Research Service.
- [11] Gallagher, Mary E, 2002. "Reform and Openness": Why China's Economic Reforms Have Delayed Democracy, *World Politics*, 54 (3): 338-372.
- [12] Das, Sanchita Basu. Challenges in Negotiating the *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, Singapore's Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- [13] Lembaga Pertahanan Nasional, 2013. *Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership* guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional, Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 16 November 2013.
- [15] Lieberthal, K. 2012. The American Pivot to Asia. Why president Obama's turn to the East is Easier Said than done, Foreign Policy.
- [16] Manyin, Mark E. 2012. Pivot To The Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia. Congressional Research Paper. Washington, Congressional Research Service.
- [17] Petri, Peter A., Michael G. Plummer dan Fan Zhai, 2011. "The Trans-Pacific Partnership and AsiaPacific Integration: A Quantitative Assessment." East-West Center Working Paper Economic Series119.
- [18] Quinn, Adam, 2013. US Pivot To Asia Between Continuity And Change, Assignment Coversheet. University of Birmingham.
- [19] Sihono, Teguh, 2008. Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol. 5, No. 2.
- [20] Stiglitz, Joseph E, 2003. Globalization and growth in emerging markets and the New Economy, *Journal of Policy Making*, 25: 505-524.
- [21] Muhamad, Simela Victor, 2016. Hubungan Indonesia-Amerika Serikat Setelah Terpilihnya Donald Trump Sebagai Presiden, Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VIII, No. 22/II/P3DI/November/2016.
- [22] Wangke, Humphrey, 2015. Kesiapan Indonesia menjadi Anggota Trans-Pacific Partnership, dalam "Info Singkat Hubungan Internasional", Vol. VII, No. 2 1/I/P3DI, November 2015.
- [23] Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2015. *Perkembangan Realisasi Investasi Pma Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Lkpm) Menurut Negara 2015* [online]. www.bkpm.go.id [diakses 20 Mei 2017].
- [24] Kementerian Luar Negeri RI, t.t. *Diplomasi Indonesia 2011* [online]. <http://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202011.pdf> [diakses pada 14 Juni 2017].
- [25] Kementerian Luar Negeri RI, 2014. *Diplomasi Indonesia 2014* [online]. <http://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202014.pdf> [diakses 17 April 2017].
- [26] Kementerian Perdagangan RI, 2015. *Peluang dan Tantangan Indonesia Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, Warta Ekspor, edisi Januari, Ditjen PEN/WRT/04/I/2015.
- [27] Asia-Pacific Trade And Investment Report, 2009. [online] http://www.unescap.org/sites/default/files/5%20-%20Introduction_1.pdf. [diakses 11 Juni 2017].
China FTA Network, t.t. *China's Free Trade Agreements* [online] <http://fta.mofcom.gov.cn/> [diakses 11 January 2017].

- [28] Indonesia-AS Berkomitmen Ikut Menyelesaikan Konflik Laut China Selatan, 4 September 2012. [online] <http://indonesia.ucanews.com/2012/09/04/indonesia-as-berkomitmen-ikut-menyelesaikan-konflik-laut-china-selatan/> [diakses 23 April 2017].
- [29] Katadata, 2015. Ekspor Nonmigas Masih Andalkan AS dan Cina [online] <http://katadata.co.id/infografik/2015/03/06/ekspor-nonmigas-masih-andalkan-dan-cina> [diakses pada 22 April 2017].
- [30] The World Bank, 2016. *China: Overview* [online] <http://www.worldbank.org/en/country/china/overview> [Diakses pada 9 Januari 2017].
- [31] Amindoni, Ayomi, t.t. Indonesia to Form Special TPP Team This Month, The Jakarta Post [online] <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/10/ri-form-special-tpp-team-month.html> [diakses 11 April 2016].
- [32] Anon, Gita Wirjawan Tegaskan RI Tolak Ajakan Obama Masuk 'TPP' dalam Detik Finance [online] <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1767659/gita-wirjawan-tegaskan-ri-tolak-ajakan-obama-masuk-tpp> [diakses 10 Oktober 2016].
- [33] Davis, Julie Hirschfeld, t.t. President Joko Widodo of Indonesia Joins Trans-Pacific Partnership 2015 dalam New York Times [online] <http://www.nytimes.com/2015/10/27/us/politics/president-joko-widodo-of-indonesia-joins-trans-pacific-partnership.html> [diakses 10 Oktober 2016].
- [34] Zeneli, Valbona. TPP: A Step Forward in Multilateral Cooperation dalam The Diplomat [online] <http://thediplomat.com/2015/10/tp-p-a-step-forward-in-multilateral-cooperation/> [diakses 20 Maret 2016].
- [35] Kementerian Perdagangan RI. Negara Tujuan Ekspor 10 Komoditi Utama [online] <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/10-main-and-potential-commodities/10-main-commodities> [diakses 25 Juni 2017].
- [36] Kementerian Perindustrian RI, 2016. *Jepang Investor Nomor Satu* [online] dalam <http://kemenperin.go.id/artikel/6113/jepang-Investor-Nomor-Satu> [diakses 24 April 2017].
- [37] Remarks By President Obama to the Australian Parliament, The White House – Office of the Press Secretary [online] <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament> [diakses 24 Maret 2017].